

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi, oleh karena itu harus dijaga dari semua pelanggaran pemilu diantaranya tindak pidana pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 2) Bagaimana penegakan hukum Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr; 3) Apa kendala yang dihadapi saat penegakan hukum Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif, dengan metode pengumpulan menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Analisis datanya secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan proses penegakkan hukum tindak pidana pemilu perkara nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr, sama seperti dengan proses penegakkan hukum tindak pidana umum lainnya dengan penerapan asas *lex specialist derogat lex generali*. Penegakan tindak pidana pemilu diatur dalam buku kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr, merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan dakwaan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park, Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan Terdakwa Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh beberapa Kepala Desa. Perkara nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr majelis hakim memberikan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*) kepada terdakwa, karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi. Majelis hakim lebih melihat penegakan hukum dalam makna yang sempit atau formal artinya penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan wawancara yang dihimpun penulis kepada hakim. Kendala yang muncul di beberapa proses: 1) proses kajian, tidak ada upaya paksa klarifikasi para pihak dan penyitaan barang bukti; 2) ketidakhadiran ahli, untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim; 3) Celah hukum yang timbul terkait pendaftaran pelaksana kampanye pemilu berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum; 4) Limitasi waktu. Untuk mengatasi kendala dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Upaya paksa yang tidak dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dapat diatasi pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian; 2) ketidakhadiran ahli keterangannya diberikan dalam bentuk alat bukti surat; 3) Celah hukum semoga ada perbaikan dalam Undang-Undang Pemilu; 4) limitasi waktu, pelibatan gakkumdu dari awal dugaan pelanggaran.

**Kata kunci : Hasil temuan, Penegakan, Tindak Pidana, Pemilu.**

## ABSTRACT

General election is the most tangible form of implementing democracy, therefore it must be protected from all election violations, including election crimes. The problems in this research are 1) How is law enforcement on election criminal acts in terms of Law Number 7 of 2017; 2) How is the law enforcement of Case Number 136 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr; 3) What are the obstacles faced when enforcing the law Case Number 136 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr and the solutions.

The approach method used is sociological juridical with descriptive research specifications, with the collection method using interview and literature methods. Qualitative data analysis.

The results of the study show that the law enforcement process for the criminal election case number 136 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr is the same as the law enforcement process for other general crimes by applying the *lex specialist derogat lex generali* principle. Election criminal enforcement is regulated in the fifth book of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Case Number 136 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr, was the finding of the Banjarnegara Regency Bawaslu with the indictment of Article 493 Jo Article 280 paragraph (2) letter h of Law Number 7 of 2017, during Meet The People activities face to face with the community with Prof. .Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono on Monday, 29 October 2019 from 19.00 WIB to 22.00 WIB at the Golden Room Surya Yudha Park, Rejasa Village, Madukara District, Banjarnegara Regency with the Defendant Hadi Suwarno as Chair of the DPC of the Banjarnegara Regency Democratic Party which was attended by several Village Heads . Case number 136 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr, the panel of judges gave the decision to release all legal charges (*onslag van alle rechtsveronging*) to the defendant, because one element of the indictment was not fulfilled. The panel of judges sees law enforcement in a narrow or formal sense, meaning that law enforcement only concerns the enforcement of formal and written regulations. Based on interviews compiled by the author to the judges. Obstacles that emerged in several processes: 1) the review process, there was no attempt to force clarification of the parties and confiscation of evidence; 2) the absence of experts, to give confidence to the panel of judges; 3) Legal loopholes that arise regarding the registration of election campaign implementers have the potential to lead to smuggling of laws; 4) Time limitation. To overcome the obstacles, it is carried out in the following ways: 1) Forced measures that are not owned by Bawaslu of Banjarnegara Regency can be overcome during the examination at the Police Investigator; 2) the absence of the expert, the statement is given in the form of documentary evidence; 3) Legal loophole. Hopefully there will be improvements in the Election Law; 4) time limitation, involving *gakkumdu* from the beginning of the alleged violation.

**Keywords: Findings, Enforcement, Crime, General Election.**